

**THE INFLUENCE OF ORIGINAL REGIONAL INCOME AND GENERAL ALLOCATION FUNDS TO CAPITAL EXPENDITURE ON DISTRICTS / CITIES IN RIAU PROVINCE**

**Fadrul dan Eka Pariani**

Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia

Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 No. Telp. (0761) 24418 Pekanbaru 28127

Email: [fadrulwf@gmail.com](mailto:fadrulwf@gmail.com) dan [Ekapariani@gmail.com](mailto:Ekapariani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the effects caused by the variable of Original Regional Income and General Allocation Fund on Capital Expenditure at Regency / City in Riau Province. Sampling technique in this research using purposive sampling technique. The population in this study consists of 10 districts and 2 cities in Riau Province. With observation period of research for 3 years, that is 2013 - 2015. The method of analysis used in this research is multiple linear regression analysis with the help of SPSS Program. From the results of research that has been done, simultaneous regression test (Test F) shows that overall has a significant significance to the dependent variable (Capital Expenditure). Partial regression test (T test) does not show significant influence to Dependent Variable (Capital Expenditure) and General Allocation Fund. Breathing Influence in effect (R<sup>2</sup>) by both variables. Show the influence of 52,30% to working capital.*

**Keywords:** Local Revenue, General Allocation Fund and Capital Expenditure.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU**

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota di Propinsi Riau. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Riau. Dengan periode pengamatan penelitian selama 3 tahun, yaitu 2013 – 2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan Program SPSS. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, uji Regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal). Uji regresi Parsial (Uji T) menunjukkan Bahwa Variabel Independen (Pendapatan Asli Daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Dependen (Belanja Modal) dan Dana Alokasi Umum terdapat Pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Besarnya pengaruh yang di timbulkan (R<sup>2</sup>) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh sebesar 52,30% terhadap belanja modal.*

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, berimplikasi pada terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah (Jolianis, 2016).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, APBD menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Amrozi (2013) dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi menyatakan anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan suatu Pemerintah Daerah. Pada sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dapat dilihat tingkat kemandirian suatu daerah, dimana semakin tinggi nilainya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Dengan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah sehingga pemerintah daerah dapat leluasa mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah melalui belanja modal. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang di gunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Belanja Modal). Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, 2008).

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Rumiyati, 2013). Saragih (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (2009), menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Felix (2012) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Ketiga pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja daerah dalam hal ini belanja modal untuk berbagai kepentingan publik.

Pemerintah pusat terus menghimbau Pemerintah Daerah (PEMDA) agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen dari total APBD, (dalam artikel situs Kemendagri pada tanggal 11 Desember 2013 dengan alamat <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>), terlebih dari total Belanja Modal yang telah dialokasikan, sebagian untuk kepentingan lembaga atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Misalnya, bangunan kantor dan *meubelair*. Sementara persentase Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dari tahun 2013-2015 masih banyak yang belum memenuhi himbauan tersebut.

Sementara persentase Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dari tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Data belanja modal merupakan data alokasi anggaran pada APBD, sedangkan Total Belanja merupakan data realisasi belanja masing-masing daerah. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) kabupaten/ kota yang belum memenuhi himbauan tersebut yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Kota Pekanbaru dan Dumai. Pada tahun 2014 jumlah kabupaten/ kota yang belum memenuhi himbauan diatas berkurang, terdapat 2 (dua) kabupaten / kota yang belum memenuhi himbauan yaitu Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar. Sedangkan pada tahun 2015 ada 5 (lima) kabupaten/ kota yang belum memenuhi himbauan tersebut yaitu Kuantan Singingi, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Dumai, bahkan Kabupaten Kampar persentasenya sangat kecil yaitu 18 %.

Data anggaran pada belanja modal ini memiliki persentase lebih besar dari pada data realisasi belanja modal pada kabupaten /kota di Provinsi Riau. Apabila data Belanja Modal yang dibandingkan maka persentasenya terhadap Total Belanja akan lebih kecil lagi.

**Tabel 1. Data Kabupaten / Kota Di Provinsi Riau TA. 2013- 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)**

| NO           | Kabupaten/Kota<br><i>Regency/City</i> | TO TAL BELANJA |            |            | BELANJA MODAL |             |             |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|              |                                       | 2013           | 2014       | 2015       | % THD<br>TB   | % THD<br>TB | % THD<br>TB |
| 1            | Kuantan Singingi                      | 1.257.566      | 1.380.114  | 1.502.453  | 24%           | 26%         | 22%         |
| 2            | Indragiri Hulu                        | 1.467.620      | 1.736.011  | 1.373.078  | 32%           | 33%         | 38%         |
| 3            | Indragiri Hilir                       | 1.524.027      | 1.714.461  | 1.822.697  | 23%           | 30%         | 33%         |
| 4            | Pelalawan                             | 1.345.055      | 1.362.139  | 1.684.164  | 41%           | 58%         | 51%         |
| 5            | Siak                                  | 2.263.619      | 2.647.678  | 2.690.439  | 32%           | 35%         | 46%         |
| 6            | Kampar                                | 2.114.899      | 2.498.985  | 2.543.966  | 23%           | 23%         | 18%         |
| 7            | Rokan Hulu                            | 1.422.404      | 1.374.147  | 1.373.078  | 30%           | 38%         | 27%         |
| 8            | Bengkalis                             | 3.686.421      | 3.544.642  | 4.546.130  | 56%           | 61%         | 42%         |
| 9            | Rokan Hilir                           | 2.281.576      | 1.821.224  | 2.128.433  | 56%           | 73%         | 22%         |
| 10           | Kepulauan Meranti                     | 1.002.663      | 1.142.707  | 1.205.638  | 52%           | 51%         | 35%         |
| 11           | Pekanbaru                             | 1.938.889      | 2.342.869  | 2.536.344  | 25%           | 38%         | 51%         |
| 12           | Dumai                                 | 1.212.894      | 1.291.017  | 1.044.125  | 26%           | 32%         | 23%         |
| Jumlah/Total |                                       | 21.517.632     | 22.855.994 | 24.450.546 |               |             |             |

Sumber : Data Diolah

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja lainnya.

Dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wandira, 2012). Infrastruktur dan sarana dan prasarana merupakan belanja yang termasuk pada belanja modal.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004), melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan adanya transfer dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) ini, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Peneliti sebelumnya seperti (Mentayani, 2013) yang meneliti di Kabupaten dan Kota di Kalimantan memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan (Sugiarthi, 2014) yang meneliti di daerah Kabupaten Buleleng memperoleh hasil PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisa pengaruh signifikan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau. Menguji pengaruh signifikan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2013 - 2015."

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut.

### **Pajak Daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya

### **Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagian pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2007) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

### **Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD. (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN. (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### **Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup: (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Jasa giro. (3) Pendapatan Bunga. (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. (5) Pendapatan denda pajak. (6) Pendapatan denda retribusi. (7) Dan lain-lain.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Mardiasmo (2007), “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”. Sedangkan menurut Halim (2008), “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, seperti

dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Indikator variabel belanja modal antara lain: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya .

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PAD, DAU, Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau yang meliputi 10 daerah Kabupaten dan 2 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 12 daerah.

### **Teknik Penarikan Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2012). Teknik sampling yang digunakan adalah teknik full sampling, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2013 – 2015.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel merupakan jumlah yang terukur yang dapat bervariasi atau mudah berubah (sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai) (Kuncoro, 2010). Untuk mempermudah pengukuran variabel penelitian, maka peneliti membutuhkan pengukuran dan definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas digunakan model persamaan regresi berganda.

Berikut ini pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Variabel Dependen**

Belanja Modal adalah untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Dalam Permendagri No. 59 tahun 2007), seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### **Variabel Independen**

Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Analisis Deskriptif**

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam analisis deskriptif ini akan menjelaskan tentang analisis deskriptif masing-masing variabel dan analisis deskriptif statistik.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji Multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara variabel bebas. Multikorelasi dapat dilihat dari nilai VIF (*variance-inflating factor*). Jika  $VIF < 10$ , tingkat kolinearitas dapat ditoleransi (Sarjono dan Julianita, 2011:70).

#### Uji Autokorelasi

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:80), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*disturbance term*-ed) pada periode  $t$  dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:66), heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians tabel tidak sama untuk semua pengamat/observasi. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, yaitu dengan melihat *scatterplot*.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Metode Analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yaitu variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum) dan variabel terikat (Belanja Modal). Pengaruh antara keduanya ini akan diformulasikan ke dalam persamaan (Sugiyono, 2012).

Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

$Y$  = Belanja Modal

$a$  = Konstanta

$X_1$  = PAD

$X_2$  = DAU

$b_1b_2$  = koefisien regresi untuk masing-masing variabel  $X$

$e$  = Error term

#### Uji Model (F)

Uji simultan dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , dengan tingkat keyakinan 95%.

Adapun kriteria keputusan yang di ambil sebagai berikut:

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  Maka  $H_a$  Di terima dan  $H_o$  di tolak.

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  Maka  $H_a$  Di tolak dan  $H_o$  di terima.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

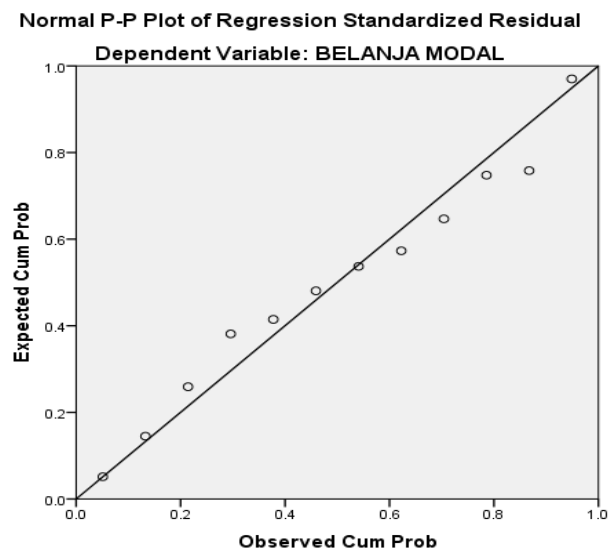
#### Pengujian Hipotesis (Uji $t$ )

Dibagi menjadi dua: (1) Pengujian hipotesis pertama. Pengujian hipotesis pertama digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. (2) Pengujian hipotesis kedua. Pengujian hipotesis kedua

digunakan untuk mengetahui apakah variable independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen yaitu antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan keterangan gambar di atas, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model | Unstandardized Coefficients |             | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|       | B                           | Std. Error  | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)                  | 3331468.887 | 931498.939                | 3.576 | .006 |                         |       |
|       | PAD                         | 1.601       | .910                      | .405  | .112 | .999                    | 1.001 |
|       | DAU                         | -1.274      | .500                      | -.586 | .031 | .999                    | 1.001 |

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel diatas tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .723 <sup>a</sup> | .523     | .417              | 1093196.19641              | 1.702         |

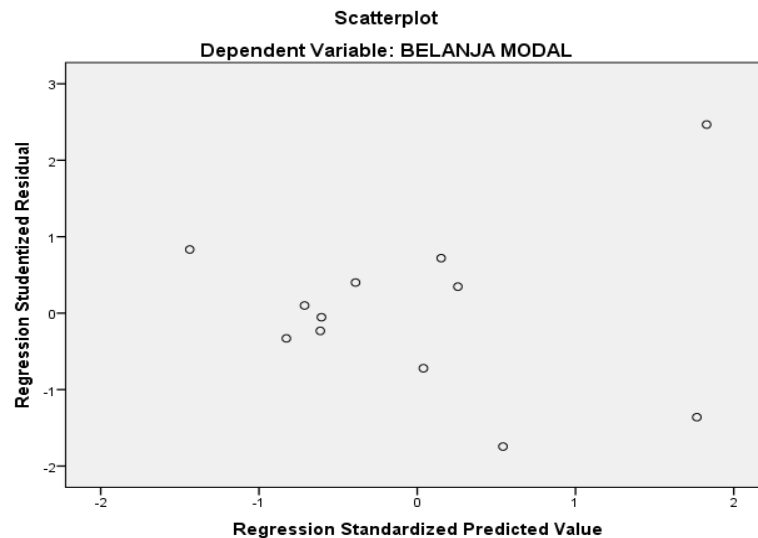
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson tabel di atas, nilai DW untuk kedua variabel independen adalah 1,702 yang berarti nilai DW berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian ini.

### Uji Heterokedasitas



Sumber : Data Olahan

**Gambar 2. Hasil Uji Heterokedasitas**

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas ini terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Dari hasil uji asumsi klasik di atas, dapat diketahui bahwa semua uji telah terpenuhi. Artinya, model regresi terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan terdistribusi normal.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

| Model | Unstandardized Coefficients |             | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|------|
|       | B                           | Std. Error  | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)                  | 3331468,887 | 931498,939                | 3,576 | ,006 |
|       | PAD                         | 1,601       | ,910                      | ,405  | ,112 |
|       | DAU                         | -1,274      | ,500                      | -,586 | ,031 |

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Data Olahan

Koefisien regresi dapat diperoleh dari Tabel 4, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\text{Belanja Modal} = 3.333.468,887 + 1.601x_1 - 1.274x_2 + e$$

Angka konstanta sebesar 3.333.468,887 menyatakan bahwa bila Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum nilainya 0, maka Belanja Modal nilainya adalah sebesar 3.333.468,887.

Koefisien regresi untuk X1 sebesar 1.601 artinya adalah jika variabel independent lain nilainya tetap dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel X1 mengalami kenaikan 1 % maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 1.601. Nilai positif pada koefisien tersebut artinya terjadi hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM). Semakin naik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Belanja Modal (BM) akan naik.

Koefisien regresi untuk X2 yang negatif (-1.274) artinya adalah jika variabel independent lain nilainya tetap dan Dana Alokasi umum (DAU) mengalami penurunan sebesar 1.274. Nilai negatif pada koefisien tersebut artinya terjadi hubungan negatif antara Dana Alokasi umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM). Semakin naik Dana Alokasi umum (DAU) maka Belanja Modal (BM) akan turun.

### Uji F (Model)

**Tabel 5. Hasil Uji Uji F**

| Model      | Sum of Squares     | df | Mean Square       | F     | Sig.              |
|------------|--------------------|----|-------------------|-------|-------------------|
| Regression | 11810933878525.639 | 2  | 5905466939262.819 | 4.941 | .036 <sup>b</sup> |
| 1 Residual | 10755701314549.280 | 9  | 1195077923838.809 |       |                   |
| Total      | 22566635193074.918 | 11 |                   |       |                   |

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DAU , PAD

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel di atas, diperoleh nilai uji F hitung sebesar 4.941 > F tabel sebesar 4,26 dan signifikan pada 0,036 < 0,05. Dengan demikian H<sub>0</sub> di tolak dan H<sub>a</sub> di terima yang berarti semua variabel independen ( Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal).

Dari hasil penelitian secara simultan jika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh maka semakin tinggi juga yang dialokasikan untuk belanja modal. Begitu juga dengan Dana Alokasi Umum, semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah maka semakin besar juga persentasi Belanja Modal daerah tersebut.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .723 <sup>a</sup> | .523     | .417              | 1093196.19641              | 1.702         |

a. Predictors: (Constant), DAU , PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan perhitungan nilai tersebut diatas di peroleh ini maka Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0.523. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dan DAU memberikan pengaruh sebesar 52,30% terhadap belanja modal. Sedangkan sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

#### Pengujian hasil penelitian hipotesis pertama

**Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Pertama**

|   | Model                  | t     | Sig. |
|---|------------------------|-------|------|
| 1 | (Constant)             | 3.576 | .006 |
|   | Pendapatan Asli Daerah | 1.760 | .112 |

Sumber : Data Olahan

Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 di atas di peroleh nilai Thitung sebesar 1,760 dan Ttabel sebesar 2,262 (Thitung < Ttabel) dan Pvalue sebesar 112 > 0.05. maka hasil penelitian ini menyatakan maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Dari hasil penelitian semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh kepada besar dan kecilnya alokasi untuk Belanja Modal pada kabupaten /kota di Provinsi Riau.

#### Pengujian Hasil Penelitian Hipotesis Kedua

**Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Kedua**

|   | Model      | t     | Sig. |
|---|------------|-------|------|
| 1 | (Constant) | 3.576 | .006 |

|                   |        |      |
|-------------------|--------|------|
| Dana Alokasi Umum | -2.547 | .031 |
|-------------------|--------|------|

Sumber : Data Olahan

Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4.11 di atas di peroleh nilai Thitung sebesar – 2.547 dan Ttabel sebesar - 2,262 (Thitung > Ttabel) dan Pvalue sebesar  $0.031 < 0.05$ . maka hasil penelitian ini menyatakan maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Dari hasil penelitian semakin tinggi Dana Alokasi Umum berpengaruh kepada besar dan kecilnya alokasi untuk Belanja Modal pada kabupaten /kota di Provinsi Riau.

## Pembahasan

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2007). Seperti yang di ketahui bahwa Belanja modal termasuk dari bagian kelompok belanja langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Namun hal itu belum tentu sepenuhnya terjadi kenaikan pada belanja modal karena belanja modal hanya bagian dari kelompok belanja langsung dari belanja daerah.

Hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah bahwa tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013), Sugiardi & Supadmi (2014), Martini & Suwendra(2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) serta Aditiya (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan pemahaman bahwa peningkatan atau penurunan tingkat Pendapatan Asli Daerah tidak atau belum tentu terjadi peningkatan dalam belanja modal pemerintah Kota/ Kabupaten di Propinsi Riau.

### Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pernyataan (Halim, 2008) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula Belanja Modal.

Hasil penelitian pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ricardo (2012), Sugiardi & Supadmi (2014), Martini & Suwendra (2014) serta penelitian Adyatma (2015) menyatakan ada hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan kelompok dari belanja langsung dari pada Belanja Daerah.

## PENUTUP

Dari Hasi uji hipotesis pertama maka hasil penelitian ini menyatakan maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ kota di Propinsi Riau.

Dari hasil uji hipotesis kedua maka hasil penelitian ini menyatakan maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten/ kota di Propinsi Riau.

Bagi pemerintah daerah agar dapat berusaha untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan asli daerah misalnya dengan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas ataupun dengan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola/bekerjasama dengan pihak -pihak yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerah , sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin dan hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dan tingkat ketergantungan terhadap transfer dari pusat juga semakin berkurang sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi Riau, dapat lebih memprioritaskan untuk mengalokasikan kepada Belanja Modal dari setiap Penerimaan Asli Daerah. Karena, Belanja Modal merupakan pengeluaran atau belanja yang dilakukan pemda yang bersifat produktif dan jangka panjang dibandingkan Belanja Rutin yang sifatnya konsumtif dan jangka pendek.

Hendaknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang lebih lengkap, agar lebih dapat melakukan generalisasi atas hasil penelitian. Misalnya dengan menambah rentang waktu yang diteliti dan memperluas obyek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi. Variabel yang bisa ditambahkan antara lain Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amrozi, Akhmad Imam. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Arwati Dini, Novita Hadiati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013). ISBN: 979-26-0266-6.
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria*. Journal of Accounting and Taxation, 4(1), pp: 1-6.
- Halim, Abdul. 2008. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Jolianis. 2016. *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening*, Journal of Economic and Economic Education, Vol.4, No. 2, Hal. 34-57.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. UNDIP. Semarang.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mentayani. 2013. *Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten di Pulau Kalimantan*. Jurnal InFestasi Vol. 9 No. 2 Desember 2013 91-102.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. 2007. *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riduawan & Kuncoro, 2010, *Metode Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Edisi Kelima. UUP STIM YKPN. Yogyakarta
- Saragih, Juli, Panglima, 2008, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita, 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Salemba Empat. Jakarta
- Stine, W. Oates, 2009, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. Economic Development and Cultural Change. Vol 49. Hal: 1- 21.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung.
- Sugiarthi, Ni Luh Dwi Eka Rini. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477-495 ISSN: 2302-8556 .
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- UU RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. ISSN 2252-6765.